

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses yang bersifat sinergis dan intergratif, baik itu yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan juga pengendalian serta evaluasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Hal tersebut juga tertuang di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, yang akan memberikan ruang terhadap pemerataan pembangunan di Indonesia.

Dalam Undang-undang memiliki tujuan sebagai upaya meningkatkan kemakmuran bersama, karena dengan adanya pemerataan pembangunan akan diiringi juga oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai keberhasilan pembangunan, kerjasama dari setiap individu menjadi sesuatu hal yang wajib karena pada dasarnya keberhasilan dari pembangunan tidak hanya berorientasi terhadap bentuk fisik saja, melainkan pembangunan juga harus berorientasi terhadap pemberdayaan masyarakat.

Dalam pemerataan pembangunan tersebut pemerintah pusat memberikan kewenangan terhadap daerah otonom untuk mengurus dan mengatur setiap urusan pemerintahannya, kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya, yang tentu hal tersebut termasuk di dalamnya mengenai pembangunan. Selanjutnya upaya pemerataan tersebut dituangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014

sebagai bentuk refleksi kemandirian daerah untuk membangun dan menciptakan kesejahteraan yang merata. Kesejahteraan dimaksud merupakan kondisi masyarakat yang terbebas dari kesulitan dari sisi materil dan non-materil.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang perencanaan pembangunan daerah, untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Daerah otonom harus berlandaskan kepada pengelolaan sumber daya yang ada, sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan pembangunan Negara. Oleh karena itu, setiap daerah otonom di Indonesia dalam mendukung pembangunan yang merata telah melaksanakan berbagai macam program dan merumuskan aktivitas kebijakan pembangunan yang bermacam-macam.¹

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) merupakan bentuk dari perencanaan Pembangunan berjangka menengah di Kota Bandung. PIPPK dalam pelaksanaannya berpedoman pada konsep pembangunan *Bottom Up* dimana masyarakat ikut andil dari setiap proses pembangunan yang dijalankan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, sedangkan posisi pemerintah dalam PIPPK yakni sebagai fasilitator yang bertugas untuk mengarahkan suatu program pembangunan, memberikan informasi dan evaluasi pada setiap program yang dijalankan. Sumber anggaran pada kegiatan PIPPK bersumber pada APBD Kota Bandung, anggaran tersebut

¹ Kementrian Dalam Negeri. *Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan.*

merupakan bentuk fasilitas pembangunan yang tetap diawasi oleh pemerintah sebagai fasilitator. Pelaksanaan PIPPK telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung No.281/2015 sehingga pelaksanaannya akan sistematis, terarah dan terorganisir dengan batasan ruang lingkup disetiap program yang akan dilaksanakan.²

Kelurahan Tamansari adalah Kelurahan mayoritas penduduknya memeluk agama islam sebanyak 10910 orang dan memiliki 31 masjid sebagai sarana beribadah umat, dengan demikian setiap program pembangunan yang dilaksanakan akan langsung dirasakan oleh umat islam. Begitu pula dengan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) dapat dijadikan sebuah sarana dakwah untuk memberikan kesejahteraan terhadap umat, seperti yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Tamansari yang mana kegiatan PIPPK dialokasikan terhadap kegiatan perbaikan masjid dan pelaksanaan magrib mengaji.

Wali Kota Bandung terdahulu telah memprioritas 7 (tujuh) program prioritas sebagai upaya untuk mencapai visi Kota Bandung yakni Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat, dan Bersahabat). Tujuh program tersebut diantaranya yaitu, Bandung Cerdas, Bandung Makmur, Bandung Hijau, Bandung Kota Seni, Bandung Berprestasi, Bandung Sehat dan Bandung Agamis.³ Setiap program yang dijalankan tentu bertujuan sebagai

² Peraturan wali Kota Bandung. *Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung.*

³<https://sekilasjabar.co/7-program-prioritas-untuk-kesejahteraan-masyarakat-kota-bandung/>
diakses pada tanggal 25 Januari 2021 Pukul 20.30

peningkatan kesejahteraan masyarakat meskipun dalam perencanaannya masyarakat tidak terlibat di dalamnya, dengan demikian sebelum adanya program PIPPK setiap program yang dijalankan pemerintah belum tercantum aspirasi masyarakat di dalamnya.

Dalam Pelaksanaan PIPPK peran komunikasi menjadi penting sebagai penyambung kebutuhan pemerintah dan masyarakat dalam mencapai pembangunan yang sinergis, dengan melalui komunikasi tersebut pemerintah dan juga masyarakat ataupun sebaliknya akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang memberi dampak positif terkhusus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan merupakan salah satu kelurahan yang telah menjalankan PIPPK kurang lebih lima tahun, yang mana program tersebut dilengkapi dengan sarana dan ruang lingkup serta diinisiasi dan dikoordinir oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), LKK dalam PIPPK tersebut mencakup Rukun Warga (RW), Karang Taruna, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Wilayah cakupan Kelurahan Tamansari yakni 20 RW dengan Tiga Lembaga Kemasyarakatan (Karang Taruna, TP-PKK, dan LPM), LKK tersebut merupakan pelaksana dan juga objek dari kegiatan PIPPK, pada tahun 2019 di Kelurahan Tamansari anggaran yang disiapkan dalam pelaksanaan PIPPK yakni 1.867.478.605,00, besaran tersebut kemudian direalisasikan oleh LKK dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Realisasi Anggaran PIPPK Kelurahan Tamansari Tahun 2019

No	Lingkup	Realisasi	Presentase
1.	Jumlah Anggaran RW Sebesar Rp. 1.602.347.206,00	Rp. 1.526.405.204,00	95,26 %
2.	Jumlah Anggaran TP-PKK Sebesar Rp. 88.550.000,00	Rp. 87.323.350,00	98,61 %
3.	Jumlah Anggaran Karang Taruna Sebesar Rp. 94.160.028,00	Rp. 90.546.500,00	96,61 %
4.	Jumlah Anggaran LPM Sebesar Rp. 82.421.371,00	Rp. 82.421.371,00	96,14%
Jumlah		Rp. 1.783.514.554,00	95,50%

Sumber : Hasil Penelitian (2021)

Dari penyerapan anggaran tersebut dana keseluruhan kegiatan LKK selama Kegiatan PIPPK tahun 2019 yang dapat direalisasikan sebesar 95%, sedangkan dengan serapan masing masing LKK RW 95,26 %, TP-PKK 98,61 %, Karang Taruna 96,61 % dan LPM 96,14%, jika diamati dalam besaran realisasi PIPPK Kelurahan Tamansari terbilang berhasil dari segi penyerapan anggaran, namun jika mengacu pada petunjuk teknis lampiran PIPPK pada Peraturan Wali Kota Bandung 281 tentang PIPPK, faktor keberhasilan tidak berfokus pada infrastruktur saja melainkan keberdayaan masyarakat menjadi tolak ukur dari keberhasilan PIPPK, karena pada prinsipnya PIPPK harus bertumpu pada pembangunan manusia dan pengembangan Inovasi. Kegiatan PIPPK Kelurahan Tamansari pada tahun 2019 hampir kebanyakan berfokus terhadap pembangunan infrastruktur saja dan belum mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam peraturan Wali Kota Bandung.

Kegiatan PIPPK di Kelurahan Tamansari terdapat ketidak sinambungan diantara kegiatan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan (Pembangunan Manusia) diantaranya kegiatan pembangunan fisik atau infrastuktur terdapat 50 Kegiatan untuk kegiatan RW sedangkan kegiatan pelatihan yang mengacu terhadap Indeks Pembangunan Manusia terdapat pada kegiatan Karang Taruna Sebanyak 2 Pelatihan dalam Rangka Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan juga pada LPM sebanyak 5 Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) serta 5 Kegiatan untuk Musrenbang dan Evaluasi Kewilayahan 5 Kegiatan. Dengan demikian esensi PIPPK yang tertuang dalam regulasi masih belum tersampaikan seutuhnya kepada masyarakat. Padahal jika implementasi PIPPK dapat berjalan dengan baik hal tersebut akan memberikan kemandirian terhadap masyarakat dalam memecahkan sebuah permasalahan.

Merujuk pada hal tersebut dengan demikian dibutuhkan Komunikasi Pembangunan sebagai upaya penerapan ide dan gagasan mengenai pembangunan terkhusus dalam pemberdayaan masyarakat, hal tersebut sejalan dengan pendapat Harun dan Ardiyanto diaman tujuan komunikasi pembangunan yaitu sebagai bentuk usaha untuk memajukan pembangunan dengan memberikan ide dan kemahiran kepada masyarakat yang memiliki kadar huruf dan pendapatan ekonomi yang rendah serta memberikan motivasi dari upaya tersebut, dalam jangka waktu yang singkat⁴. PIPPK yang mana merupakan sebuah program pembangunan dan pemberdayaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang

⁴ Harun Rochajat, dan Ardiyanto, Elvinaro. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kajian Ulang, dan Teori Kritis*. (Jakarta: Rajawali Press.2012) Hlm 162

merata merupakan sebuah kebijakan yang perlu dikomunikasikan menggunakan saluran yang tepat, akurat dan relevan hal tersebut sesuai sebagaimana Zaenal Mukarom berpendapat bahwa komunikasi pembangunan merupakan proses sosialisasi program pembangunan kepada masyarakat menggunakan media yang tepat dengan melibatkan sekurang – kurangnya 3 (Tiga) komponen yaitu : Komunikator (Pemerintah sebagai pemberi rumusan kebijakan PIPPK), Pesan Pembangunan (PIPPK sebagai kebijakan yang dirumuskan) dan Komunikan (Masyarakat selaku Pelaku dan juga objek dari pembangunan PIPPK)⁵. Selanjutnya Komunikasi Pembangunan berperan sebagai stimulus untuk membuka wawasan dan pemikiran pada masyarakat, sebagai media pemberdayaan masyarakat melalui program – program yang dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengambilan keputusan serta mendidik masyarakat dalam meningkatkan kemandirian.

PIPPK merupakan sebuah Inovasi ide yang saat itu dirumuskan oleh Ridwan Kamil saat menjabat menjadi Wali Kota Bandung, yang mana pada periode sebelumnya pembangunan hanya bertitik fokus pada infrastruktur saja dan belum melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya dengan demikian PIPPK merupakan sebuah gejala sesuatu, berupa ide dan cara – cara dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, dimana hal tersebut merupakan hal yang baru karena PIPPK merupakan program yang secara utuh dituangkan kedalam regulasi. Inovasi tersebut tentu tidak hanya terbatas dalam kurun waktu sejak ditemukan gagasan tersebut melainkan jika gagasan tersebut

⁵ Zaenal Mukarom. *Teori-teori Komunikasi*. (Bandung: Jurnal Manajemen Dakwah. 2020) Hlm 229

dipandang baru dalam masyarakat maka hal itu merupakan sebuah Inovasi, Inovasi yang disampaikan kepada masyarakat tentu perlu didifusikan terlebih dahulu, menurut Everett M. Roges (1971) Studi difusi merupakan studi yang mengkaji pesan pesan berupa ide dan gagasan baru kepada masyarakat yang sedang melaksanakan proses pembangunan sebagaimana seperti di negara berkembang. Pemerintah sebagai inovator perlu memberikan edukasi serta pemberdayaan masyarakat dengan melakukan informasi yang merata agar tercapainya keberhasilan program yang paripurna⁶.

Sebagaimana Rogers dan Shoemaker (1971) Difusi Invoasi sebagai suatu fenomena yang berjalan sinergis dengan perubahan sosial yang terjadi, perubahan sosial yang terjadi diantaranya dilatar belakangi oleh diperkenalkanya atau masuknya gagasan atau ide baru ditengah suatu sistem sosial yang juga disebabkan oleh terjadinya komunikasi dalam anggota masyarakat, oleh karena itu, komunikasi merupakan sesuatu yang sentral dalam pembentukan dan penerimaan sebuah inovasi.⁷ Yang mana pada saat itu masyarakat haya berfikir bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berupa pembangunan fisik namun saat ini PIPPK berupaya dalam peningkatan potensi yang ada serta pengembangan potensi manusia dalam memecahkan masalahnya sendiri. Dengan demikian Kelurahan Tamansari sebagai ujung tombak dalam proses penyebar luasan PIPPK tentu perlu memperhatikan unsur – unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah komunikasi pembangunan, yang mana hal tersebut mencakup diantaranya : Inovasi (sebagai

⁶ Ibid. Hlm 226

⁷ Ibid

bentuk penerimaan masyarakat terhadap PIPPK), Saluran Komunikasi (media sosialisasi yang dilakukan pemerintah wilayah dalam memberikan informasi PIPPK), waktu (berapa lama masyarakat menerima PIPPK yang meliputi pengetahuan, konfirmasi dan keputusan inovasi) dan Sifat Masyarakat (kesesuaian PIPPK dalam kearifan lokal yang meliputi Struktur sosial, Norma dan Opini Pemimpin). Dengan demikian peneliti berusaha menggambarkan bagaimana difusi inovasi dalam kegiatan komunikasi pembangunan sebagai media dakwah pada program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) dan akan memaparkan secara mendalam setiap fenomena yang terjadi, setiap informasi yang disampaikan oleh informan, pemahaman pemerintah dan masyarakat terkait inovasi yang didifusikan (PIPPK) di wilayah Kelurahan Tamansari.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pembatas bagi objek penelitian yang diangkat selain itu Fokus penelitian Berguna agar peneliti tidak terjebak oleh banyaknya data yang dihimpun di lokasi penelitian, fokus penelitian akan diarahkan terhadap kebaruan informasi dan teori yang sedang dikaji, hal tersebut dimaksud untuk membatasi topik penelitian studi kualitatif dan sebagai seleksi informasi yang relevan dengan topik penelitian sebagaimana Moleong berpendapat bahwa fokus penelitian adalah sebuah pedoman dalam mengambil data apapun yang relevan dengan topik permasalahan penelitian. Fokus penelitian wajib bersifat konsisten

dengan permasalahan serta tujuan penelitian⁸. Selanjutnya Sugiyono berpendapat bahwa pembatasan di dalam sebuah penelitian Kualitatif berdasarkan pada tingkat kepentingan dan reliabilitas masalah yang diteliti atau akan dipecahkan⁹. Juga penelitian ini terpusat pada sebuah fenomena atau studi kasus dimana menurut Sutedi penelitian studi kasus merupakan penelitian yang terfokus terhadap kasus tertentu yang dianalisis secara cermat, tuntas dan menyeluruh. Kasus yang diamati bisa berupa tunggal atau jamak (kelompok),¹⁰ fenomena atau kasus dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan tujuan dari regulasi dengan implementasi PIPPK yang terjadi di Kelurahan Tamansari.

Dengan demikian penelitian ini memusatkan kajian pada desain dan implementasi difusi inovasi dalam sistem komunikasi pembangunan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayan (PIPPK) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. Fokus Penelitian ini diturunkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana desain difusi inovasi komunikasi pembangunan pada PIPPK Sebagai Media Dakwah di Kelurahan Tamansari?
2. Bagaimana Saluran Komunikasi Pembangunan pada PIPPK di Kelurahan Tamansari?

⁸ Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm 92

⁹ Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV. Hlm 207

¹⁰ Adrian Sutedi. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika Hlm 61

3. Bagaimana proses implementasi difusi inovasi komunikasi pembangunan PIPPK Sebagai Media Dakwah di Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung?
4. Bagaimana tingkat penerimaan masyarakat Kelurahan Tamansari atas PIPPK?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari penelitian ini merupakan sebagai studi eksploratif terhadap difusi inovasi dalam kegiatan komunikasi pembangunan pada Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) dengan pendekatan teori Dufsi Inovasi sehingga dapat mengetahui pemahaman masyarakat terhadap kegiatan komunikasi pembangunan yang sedang diinovasikan yaitu PIPPK. Secara khusus tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan pemahaman secara menyeluruh mengenai bagaimana pemerintah Kelurahan Tamansari dan masyarakat dalam kegiatan komunikasi pembangunan, lebih lanjut tujuan dalam penelitian ini menyangkut dalam hal – hal sebagai berikut.

- a. Mengidentifikasi desain difusi inovasi komunikasi pembangunan Sebagai Media Dakwah pada PIPPK.
- b. Mendeskripsikan Saluran Komunikasi Pembangunan pada PIPPK di Kelurahan Tamansari.

- c. Mendeskripsikan proses implementasi difusi inovasi komunikasi pembangunan PIPPK Sebagai Media Dakwah di Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung.
- d. menganalisis tingkat penerimaan masyarakat Kelurahan Tamansari atas PIPPK.

2. Kegunaan Penelitian.

Dalam kegunaanya penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yakni pada aspek teoritis dan aspek praktis dalam rincian sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam komunikasi pembangunan yang berhubungan dengan Difusi Inovasi selain itu dalam bidang keilmuan Komunikasi Penyiaran Islam penelitian ini bermanfaat sebagai bentuk monografi Dakwah melalui *Tathwir* atau *Tamkin Al-Dakwah* yaitu dakwah pengembangan atau pemberdayaan sebagaimana Aep Wahyudin menjelaskan bahwa islam merupakan sebuah usaha mengkomunikasikan pesan dan nilai ilahiyah dari tatanan deduktif idealistik kepada tatanan induktif realistic dengan sasaran keselamatan hidup umat manusia yang memiliki perbedaan realitas sosial, karena esensinya islam merupakan sebuah rahmat bagi seluruh alam dengan demikian dakwah memiliki ruang lingkup baik dalam *Syakhsiyah* (Personal), *Usroh*

(Komunal), *Jama'ah* (sosial) dan umat,¹¹ oleh karena itu pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari bentuk ruang lingkup dakwah dalam Tindakan sosial (*Jama'ah*) berkaitan dengan hal tersebut maka setiap kegiatan atau inovasi yang dikembangkan ataupun dilaksanakan melalui dakwah pemberdayaan tentu perlu adanya difusi sebagai upaya adopsi dari masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi peneliti diharapkan penelitian ini menjadi penambahan khazanah ilmu pengetahuan dan juga wawasan kepada peneliti, selanjutnya penelitian ini adalah bentuk dari praktek penerapan ilmu yang sudah diemban serta dipelajari oleh peneliti selama menjalankan studi perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Pasca Sarjana Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam.
- 2) Bagi Universitas, Rangkaian kegiatan dan dokumen penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur serta bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya terkhusus dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan dengan metode dan fokus penelitian lain secara mendalam.
- 3) Bagi Lembaga pemerintahan wilayah (Kelurahan), dokumen penelitian ini diharapkan mampu menjadikan motivasi bagi kelurahan untuk meningkatkan performa dan juga sebagai rujukan dalam meningkatkan

¹¹ Aep Wahyudin. 2012. *Episteme Dakwatologi Komunikasi (Menakar Komunikasi islam dalam Epsitemologi Triangular Relationship)*. Ilmu Dakwah: *Academic Journal for Homiletic Studies* Vol 6 No.2 Hlm 214

efektifitas terkhusus dalam pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan selain itu dokumen ini dapat dijadikan bahan evaluasi pada program tersebut.

D. Landasan Pemikiran

Penelitian ini dilandaskan pada inovasi ide atau gagasan berupa kebijakan di Kota Bandung yang mana telah dijelaskan pada latar belakang bahwa dalam realisasi anggaran PIPPK sudah berjalan dengan baik namun hal tersebut bukan menjadi tolak ukur dari keberhasilan sebuah Inovasi yang telah didifusikan jika merujuk pada lampiran Perwal Kota Bandung No.436/2015 tentang petunjuk teknis Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).

PIPPK harus bertumpu terhadap pembangunan manusia yang mana setiap kegiatan PIPPK harus dapat meningkatkan taraf hidup manusia secara menyeluruh. dengan demikian gagasan tersebut merujuk terhadap tujuan Pemberdayaan yang mana menurut Deptan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah strategi pembangunan yang berbasis masyarakat dalam upaya perbaikan fisik, mental, ekonomi maupun sosial budaya¹². Dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah sebuah upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mana hal tersebut sesuai dengan pengertian kesejahteraan menurut Midgely menyatakan bahwa kesejahteraan atau kondisi sejahtera merupakan terpenuhinya kebutuhan manusia baik dalam bentuk material atau dalam bentuk non-material kondisi

¹² Totok Mardikanto & Poerwoko Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat dalam prespektif kebijakan publik*. (Bandung : Alfabeta. 2015) Hlm 109

tersebut dapat digambarkan sebagaimana kondisi individu atau sekelompok manusia ketika merasa aman, dan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti gizi, Kesehatan, Pendidikan, tempat tinggal dan juga penghasilan.¹³

Pada dasarnya pembangunan nasional merupakan membangun manusia seutuhnya baik fisik maupun non fisik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Selanjutnya dalam Al- Quran Allah Berfirman pada Qs. Ali Imran : 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”

Oleh karena itu sebagaimana uraian di atas maka kaum muslimin, sebagai objek maupun subjek dakwah perlu kiranya melaksanakan hal sebagai berikut:¹⁴
Pertama Menyebarkan dan menubuhkan ide, gagasan islam yang digali di dalam Al-quran, sunnah dan sejarah keislaman nabi, agar kemudian masyarakat bercita-cita memiliki kepribadian sama seperti yang Rasulullah ajarkan. *Kedua* Ummat Islam sebagai “*Khaira ummatan*” tentu harus memiliki manfaat dan kekuatan untuk membebaskan umat manusia dalam berbagai macam keterbelakangan dan penderitaan. *Ketiga* Berpartisipasi aktif dalam bidang pengembangan budaya islam dan dalam bidang sosial. *Keempat* Mengembangkan dan menggali pengetahuan

¹³ Ummu Salamah. *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*. (Bandung: Insan Akademika. 2012) Hlm 1

¹⁴ Abd Rahim Arsyad. *Kedudukan dakwah dalam pembangunan bangsa*. (Parepare. Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Hlm 63

dalam bidang teknologi baik yang bersumber dari manusia, alam dan semesta.
Kelima Mengisi barisan pertahanan dan pembelaan bangsa.

Dari berbagai uraian sebelumnya dengan demikian dapat dipahami bahwa pesan dakwah pembangunan tidak lagi hanya tentang Pendidikan keislaman saja melainkan juga merupakan sebuah upaya dalam menanamkan pentingnya memperdalam ilmu pengetahuan untuk meningkatkan produksi, memperbaiki lingkungan, Kesehatan, Rumah Sakit, saluran Air dan lain – lain terkhusus untuk peningkatan kesejahteraan bangsa.¹⁵

Selanjutnya mengacu terhadap lampiran Perwal Kota Bandung No.436/2015 dasar pemikiran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) diadasi oleh pandangan bahwa setiap perubahan – perubahan dinamis yang berjalan di tengah masyarakat tentu dapat dicapai secara menyeluruh dan optimal jika dalam kegiatan pembangunan ditempuh melalui peran dan partisipasi aktif anggota masyarakat, mulai dari tingkatan yang paling bawah, terutama yang mencakup mengenai pengambilan keputusan untuk memecahkan berbagai macam persoalan yang terjadi, dengan menggunakan metode pemberdayaan masyarakat. dalam setiap proses pembangunan dan pemberdayaan tersebut kemudian pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).¹⁶

Kemudian dalam lampiran Perwal Kota Bandung No.436/2015 tentang petunjuk teknis Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

¹⁵ Ibid

¹⁶ Peraturan Wali Kota Bandung. *Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 tentang Petunjuk dan Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung.*

(PIPPK) pada prosesnya bersifat berkesinambungan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, bahkan sampai dengan pengendalian harus didukung serta diinisiasi oleh masyarakat karena pada dasarnya kegiatan pembangunan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, oleh karena itu hubungan diantara masyarakat dan pemerintah merupakan hubungan kemitraan yang strategis dalam pemecahan masalah terkhusus dalam bidang pembangunan.¹⁷

Pada kedua rujukan di atas dapat dipahami bahwa kegiatan PIPPK mengacu terhadap konsep pemberdayaan yang dirumuskan oleh Roobin yang menyatakan diantaranya :¹⁸

1. *Pertama* setiap kegiatan pemberdayaan harus memiliki *output* yang mana hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2. *Kedua*, dalam setiap prosesnya harus selalu melibatkan partisipasi masyarakat yang mencakup perencanaan sampai dengan pelaksanaan, dalam setiap program yang akan dijalankan.
3. *Ketiga*, setiap pelaksanaan yang terjadi kegiatan pembangunan fisik, dan pemberdayaan merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
4. *Keempat*, setiap kegiatan pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya yang ada, baik dalam sumber pendanaan maupun potensi lokal.
5. *Kelima*, pemerintah dalam PIPPK sebagai fasilitator harus dapat memfungsikan diri sebagai penggerak, yang mana hal tersebut berkaitan

¹⁷ Ibid

¹⁸ Nyoman Sumaryadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Jakarta : Citra Utama. 2005) Hlm 95

dengan media penghubung bagi kepentingan pemerintah yang bersifat makro dan juga kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

Kegiatan PIPPK tentu perlu diarahkan dan dikomunikasikan melalui Difusi Inovasi mengingat bahwa PIPPK merupakan sebuah konsep pembangunan yang baru terkhusus dalam bidang pemberdayaan, hal tersebut tentu bertujuan untuk mencapai keberhasilan pembangunan pada Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan kewilayahn (PIPPK) yang paripurna, yang aman hal tersebut sejalan dengan pendapat Wilbur Schramm.

Wilbur Schramm berpendapat bahwa terdapat tiga peran komunikasi dalam suatu pembangunan nasional diantaranya adalah:¹⁹

1. Menginformasikan Pembangunan, pembangunan pada intinya mengubah kehidupan manusia mulai dari individunya sampai dengan seluruh lapisan masyarakatnya. Pembangunan disalurkan dan juga disampaikan kepada masyarakat bertujuan agar masyarakat dapat memusatkan perhatiannya terhadap suatu kebutuhan yakni kebutuhan akan perubahan, dengan mengadakan sarana-sarana perubahan dan membangkitkan aspirasi nasional.
2. Menjadikan alat berpartisipasi masyarakat dalam membuat keputusan. Dengan demikian masyarakat akan diberi kesempatan dalam mengambil bagian untuk aktif dalam setiap proses pembuatan keputusan, dengan cara memperluas dialog yang kemudian hal tersebut bertujuan untuk mengajak semua lapisan masyarakat untuk ikut terlibat dalam membuat keputusan mengenai perubahan

¹⁹ Harun Rochajat, dan Ardiyanto, Elvinaro. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kajian Ulang, dan Teori Kritis*. (Jakarta: Rajawali Press. 2012) Hlm 196

itu sendiri, kemudian bagi para pemimpin atau pemerintah wilayah untuk secara terbuka menerima kritik dan pendapat terkhusus bagi rakyat kecil, yang selanjutnya dengan demikian akan menciptakan saluran informasi yang berjalan efektif atau lancar baik dari atas kebawah maupun bawah ke atas.

3. Sebagai Media Pengajar keterampilan (mendidik), dengan komunikasi Pendidikan yang selama ini diajarkan akan berjalan dengan dinamis, dari cara lama ke cara yang berbeda dengan yang dulu, mengingat bahwa pembungaran merupakan suatu proses perubahan dari arah yang belum sempurna sampai dengan kearah yang lebih baik. Selanjutnya komunikasi disampaikan untuk memberikan pendidikan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan disiapkan menjadi tenaga ahli yang handal mulai dari anak - anak sampai dengan dewasa, selanjutnya Pendidikan yang diberikan pun akan disesuaikan dengan penerimanya mulai dari mempelajari membaca dan menulis sampai dengan mengajarkan keterampilan yang keseluruhannya tentu bertujuan untuk mengubah taraf hidup masyarakat.

Peran komunikasi terhadap pembangunan tentu telah memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari penerimaan informasi, sebagai meda untuk berpartisipasi dan selanjutnya mengubah pola fikir melalui Pendidikan. Kemudian setiap komunikasi tersebut dikategorikan kedalam proses dari komunikasi pembangunan.

1. Komunikasi Pembangunan

Komunikasi Pembangunan merupakan bagian dalam bidang ilmu komunikasi, yang mulai dikembangkan pada penghujung tahun 60-an

dikalangan pakar ilmu komunikasi, telah banyak berkembang spesialis mengenai penerapan teori serta konsep komunikasi secara khusus, teori dan konsep tersebut ditujukan sebagai keperluan pelaksanaan proses ataupun program pembangunan. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian sejak saat itu konsep tersebut dikenal dengan komunikasi pembangunan.²⁰

Widjaja A.W dan Hawab berpendapat bahwa komunikasi pembangunan (*Developmental Communications*) merupakan komunikasi yang isinya memiliki pesan – pesan mengenai pembangunan. Dengan begitu kegiatan komunikasi pembangunan terdapat dalam setiap tingkatan mulai dari rakyat biasa seperti petani, pekerja kantor, buruh pabrik dan lain – lain samapi dengan pejabat seperti pemerintah wilayah, menteri, presiden dan lain sebagainya, kemudian komunikasi pembangunan juga bisa disalurkan terhadap perorangan, pembicaraan kelompok, musyawarah, Lembaga resmi penyiaran, dan lain – lain.²¹ dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunikasi pembangunan adalah suatu inovasi yang dapat diterima oleh masyarakat melalui proses komunikasi.

Zaenal Mukarom berpendapat bahwa komunikasi pembangunan merupakan proses sosialisasi program pembangunan kepada masyarakat menggunakan media yang tepat dengan melibatkan sekurang – kurangnya 3 (Tiga) komponen yaitu²² :

a. Komunikator (Pemerintah atau Masyarakat)

²⁰ Dilla, Sumadi. *Komunikasi Pembangunan : Pendekatan Terpadu*. (Bandung: Simbiosis Rektama. Media. 2007) Hlm 1

²¹ Ibid. Hlm 155

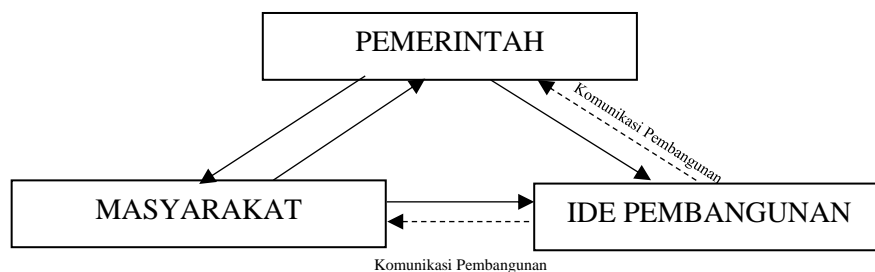
²² Zaenal Mukarom. *Teori-teori Komunikasi*. (Bandung: Jurnal Manajemen Dakwah.2020) Hlm 229

- b. Pesan Pembangunan (Program – program pembangunan)
- c. Komuikan (masyarakat luas yang menjadi objek dan sasaran pembangunan)

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) adalah program yang dirumuskan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan demikian sejalan dengan apa yang telah dipaparkan di atas maka dalam kegiatan PIPPK, Pemerintah memiliki peran sebagai komunikator diamana pemerintah bertugas dalam melaksanakan sosialisasi serta memberikan informasi terkait dengan program tersebut, dengan regulasi dan petunjuk teknis PIPPK yang menjadi pesan yang perlu disampaikan kepada masyarakat sebagai objek pembangunan ataupun komunikasi sebagai penerima pesan – pesan pembangunan.

Komunikasi dalam konteks tersebut harus ditempatkan pada posisi terdepan hal tersebut sebagai bentuk upaya dalam merubah sikap manusia sebagai pelaku utama pembangunan baik sebagai subjek maupun sebagai objek ketiga aspek tersebut dapat digambarkan kedalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1. Ilustrasi Pola Komunikasi Pembangunan pada PIPPK



Sumber : diolah oleh Peneliti

Dilansir dari sekilasjabar.co bahwa sejak dilantik pada Oktober 2003 Dada Rosada Wali Kota Bandung terdahulu telah memprioritas 7 (tujuh) program prioritas sebagai upaya untuk mencapai visi Kota Bandung yakni Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat, dan Bersahabat). Tujuh program tersebut diantaranya yaitu, Bandung Cerdas, Bandung Makmur, Bandung Hijau, Bandung Kota Seni, Bandung Berprestasi, Bandung Sehat dan Bandung Agamis.²³ Setiap program yang dijalankan tentu bermuara sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat meskipun dalam perencanaannya masyarakat tidak terlibat di dalamnya, setiap program yang dijalankan Wali Kota Bandung pada kepemimpinan Dada Rosada menggunakan pendekatan *Top Down*, yang mana Sururi Berpendapat bahwa pemerintah secara penuh melaksanakan perencanaan dan sebagai pemberi arahan tanpa melibatkan masyarakat di dalamnya.²⁴

Selanjutnya pada masa kepemimpinan Ridwan Kamil pada tahun 2014 sebagaimana dilansir dalam regional.kompas.com siap melaksanakan janji politiknya yang akan memberikan dana senilai Rp 100 Juta rupiah kepada setiap RW namun bukan berupa uang tunai secara langsung melainkan melalui Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang mana program tersebut sistemnya melalui padat karya dengan demikian setiap kegiatan pembangunan yang dijalankan memiliki prinsip dari

²³<https://sekilasjabar.co/7-program-prioritas-untuk-kesejahteraan-masyarakat-kota-bandung/>
diakses pada tanggal 25 Januari 2021 Pukul 20.30

²⁴ Sururi, A. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.* (Jurnal Administrasi Negara, 3 Nomor 2. 2016)

masyarakat dan untuk masyarakat.²⁵ atau disebut juga dengan pendekatan *Bottom up*. Yang mana menurut Ashari bentuk perencanaan *Bottom Up* diawali dengan tingkat kewenangan yang paling rendah mulai dari tingkat RT dan RW sampai dengan tingkat pemerintah pusat yang termuat aspirasi masyarakat di dalamnya.²⁶

Dengan demikian Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) merupakan sesuatu hal yang baru, terutama di wilayah Kota Bandung. Menurut Rogers inovasi dipahami tidak harus sebagaimana sesuatu hal yang baru saja melainkan jika ide atau gagasan yang dirumuskan baru diketahui oleh masyarakat pada objek penerima ide atau gagasan tersebut hal itu juga bisa disebut sebagai Inovasi namun dengan demikian mungkin bagi masyarakat lain ide atau gagasan itu bukan disebut sebagai hal baru.²⁷

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang mana merupakan sebuah inovasi kebijakan di Kota Bandung tentu perlu untuk di difusikan sebagaimana Everett M. Roges (1971) Studi Difusi merupakan studi yang mengkaji pesan pesan berupa ide dan gagasan baru kepada masyarakat yang sedang melaksanakan proses pembangunan.²⁸

²⁵<https://regional.kompas.com/read/2015/01/06/10225221/Ridwan.Kamil.Mulai.Bayar.Janji.Kamp-anye.Rp.100.Juta.Tiap.RW> diakses pada tanggal 25 Januari 2021 Pukul 20.35

²⁶ Ashari, M. *Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Utara (studi kasus Perencanaan Partisipatif tahun 2009-2013)*. (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, vol 6 nomor 2. 2015)

²⁷ Rogers. M. Everett. *Diffusion of Innovations:Third Edition*. (New York: The Free Press. 1971) Hlm 11

²⁸ Zaenal Mukarom. *Teori-teori Komunikasi*. (Bandung: Jurnal Manajemen Dakwah 2020) Hlm 226

2. Difusi Inovasi.

Difusi Inovasi merupakan sebuah teori yang umumnya dikenal dikalangan pakar atau pelaku komunikasi pembangunan, teori ini sudah digunakan oleh para perencana dan pelaku pembangunan khususnya di negara berkembang sebagai alat untuk mempengaruhi masyarakat untuk menerima ide atau gagasan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Everet M. Rogers dan Shoemaker mendefinisikan difusi inovasi sebagai teori yang mengkaji pesan – pesan yang berkaitan dengan ide ataupun gagasan yang baru, yang pada akhirnya sesuatu yang baru tersebut menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Difusi inovasi akan berlangsung seiring dengan perubahan sosial yang terjadi dengan demikian perubahan sosial tersebut akan memberikan motivasi kepada individu untuk menyebarluaskan dan menemukan hal – hal yang baru. Inovasi yang terjadi tentu dilatar belakangi oleh adanya komunikasi antara individu, Anggota Masyarakat ataupun masyarakat dengan masyarakat lainnya, dengan melalui saluran atau media komunikasi tertentu yang selanjutnya akan memberikan pengenalan, pemahaman, penilaian, serta pada akhirnya masyarakat akan memutuskan dapat menerima atau menolak inovasi yang dirumuskan. Karakteristik masyarakat dalam menerima inovasi bermacam – macam atau beragam mulai dari yang memang dengan sukarela menerima inovasi yang ada bahkan menanti kehadirannya, menyadari adanya sebuah kebutuhan akan inovasi yang dirumuskan, selanjutnya masyarakat yang menerima inovasi tersebut setelah mengkaji dan benar – benar yakin terdapat keuntungan – keuntungan di dalam

inovasi yang dirumuskan dan terakhir masyarakat yang benar – benar menolak adanya inovasi yang terjadi. Dengan demikian inovasi tidak terjadi secara serempak.²⁹

Harun dan Ardiyanto Berpendapat bahwa dalam penyaluran atau penyebarluasan inovasi terdapat unsur – unsur utama, yaitu.³⁰

a. Inovasi

Harun dan Ardiyanto Berpendapat bahwa suatu inovasi memiliki dua komponen, yang mana komponen tersebut adalah komponen ide dan komponen objek (Aspek material atau produk fisik dari ide), penerimaan dalam sebuah inovasi dengan dua komponen tersebut, tentu memerlukan adopsi untuk komponen yang bersifat objek atau material, sedangkan penerimaan pada komponen ide pada dasarnya penerimaannya berupa suatu putusan simbolik. Terdapat lima atribut Pandangan masyarakat terhadap penyebarluasan inovasi³¹:

- 1) Keuntungan – Keuntungan Relatif ;
- 2) Keserasian ;
- 3) Kerumitan;
- 4) Dapat Dicobakan dan;
- 5) Dapat Dilihat

²⁹ Ibid. Hlm 220

³⁰ Harun Rochajat, dan Ardiyanto, Elvinaro. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kajian Ulang, dan Teori Kritis*. (Jakarta: Rajawali Press. 2012) Hlm 180

³¹ Ibid. Hlm 181 - 182

b. Saluran Komunikasi

Rogers berpendapat bahwa saluran komunikasi dimaksud yaitu sebagai sarana atau media yang mana pesan Inovasi dapat disalurkan dan diterima pada setiap individu. Karakteristik atau sifat individu itu sendiri menentukan tingkatan kesuksesan inovasi yang disalurkan dari komunikator ke komunikan dari sumber ke penerima. Selanjutnya Rogers berpendapat bahwa media massa merupakan cara yang paling efisien dalam menyalurkan inovasi dan berkomunikasi dengan sejumlah pengadopsi yang potensial, namun komunikasi interpersonal akan lebih efektif dalam upaya membujuk dan mengajak pengadopsi potensial agar dapat menerima inovasi yang dirumuskan³².

c. Waktu

Rogers berpendapat bahwa waktu merupakan faktor penting dalam proses difusi inovasi, dalam pengukuran waktu. Terdapat 3 teori dalam sebuah penerimaan inovasi yaitu:³³

- 1) Teori Keputusan Inovasi;
- 2) Teori Inovasi Individual
- 3) Teori Tingkat Adopsi

d. Sifat Masyarakat

Selanjutnya unsur ke empat dalam difusi inovasi yaitu adalah sifat dari masyarakat. Dengan demikian sifat masyarakat tersebut menunjuk

³² Rogers. M. Everett. *Diffusion of Innovations: Third Edition*. (New York: The Free Press. 1971)
Hlm 17 - 18

³³ Ibid. Hlm 20

pada kepada siapa inovasi tersebut diperkenalkan dalam sistem sosial, Rogers berpendapat bahwa sistem sosial merupakan sekumpulan unit yang saling terikat dan terlibat dalam kegiatan pemecahan masalah secara bersama – sama dengan tujuan untuk mencapai kepentingan dan kesepakatan bersama. Anggota pada system sosial tersebut tentu meliputi Individu, Kelompok – kelompok atau organisasi informal. Oleh karena itu difusi inovasi didalam system sosial tentu bergantung terhadap tiga aspek yaitu³⁴:

1) Struktur Sosial

Dalam sistem sosial terdapat berbagai kelompok individu yang bertindak dan merespon inovasi secara berbeda, oleh karena itu kebutuhan akan struktur sosial di dalam sebuah sistem digunakan untuk menciptakan keteraturan dalam memprediksi perilaku individu, selain itu struktur komunikasi merupakan hal yang juga penting dalam sistem sosial, karena tidak semua anggota sistem sosial berkomunikasi, anggota yang memiliki kemiripan akan lebih sering berkomunikasi,

2) Norma

Rogers berpendapat bahwa struktur sosial dapat memfasilitasi ataupun sebaliknya dapat menghambat sebuah difusi inovasi, Norma dalam sebuah sistem sosial menjadi sebuah rujukan perilaku yang dapat diterima yang tentu dapat mempengaruhi difusi.

³⁴ Ibid. hlm 23-28

3) Pemimpin Opini

Pemimpin Opini merupakan individu yang memberikan informasi dan saran terhadap suatu inovasi, pemimpin opini biasanya mendukung norma yang ada pada struktur sosial dan berfungsi sebagai model pada orang di sekitarnya, pemimpin opini berada pada tingkatan pusat jaringan komunikasi dan memiliki relasi atau mencapai sejumlah besar orang lain yang melalui hubungan aliran Informasi.

3. Difusi Inovasi dalam kegiatan Komunikasi Pembangunan Sebagai Media Dakwah.

Kata media/wasilah dalam bahasa Arab berarti alwushlah, at attishad yang artinya segala sesuatu yang dapat menghantarkan tercapainya sesuatu yang ingin diwujudkan atau dimkasud³⁵. Selanjutnya Moh. Ali Aziz berpendapat bahwa media dakwah merupakan alat yang digunakan sebagai penyampaian materi dakwah kepada mad'u³⁶. dengan demikian PIPPK sebagai sebuah inovasi merupakan bentuk Dakwah melalui *Tathwir* atau *Tamkin Al-Dakwah* yaitu dakwah pengembangan atau pemberdayaan sebagaimana Aep Wahyudin menjelaskan bahwa islam merupakan sebuah usaha mengkomunikasikan pesan dan nilai ilahiyah dari tatanan deduktif idealistik kepada tatanan induktif realistic dengan sasaran keselamatan hidup umat manusia yang memiliki perbedaan realitas sosial, karena esensinya islam merupakan sebuah rahmat

³⁵ Enjang. AS. *Dasar-dasar Ilmu Dakwah*. (Bandung:2009) Hlm 931

³⁶ Moh. Ali Aziz. *Ilmu Dakwah*. (Prenada Media. Jakarta :2004) Hlm 120

bagi seluruh alam dengan demikian dakwah memiliki ruang lingkup baik dalam *Syakhsiyah* (Personal), *Usroh* (Komunal), *Jama'ah* (sosial) dan umat,³⁷ oleh karena itu pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari bentuk ruang lingkup dakwah dalam Tindakan sosial (*Jama'ah*) berkaitan dengan hal tersebut maka setiap kegiatan atau inovasi yang dikembangkan ataupun dilaksanakan melalui dakwah pemberdayaan tentu perlu adanya difusi sebagai upaya adopsi dari masyarakat.

4. Dakwah, Komunikasi Pembangunan dan Difusi Inovasi

Menurut Agus Ahmad Safei secara statistik mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam, secara faktual sumber daya manusia Indonesia masih sangat tertinggal dan jauh dari level cukup untuk bisa berkompetisi dengan yang lainnya, masyarakat Indonesia masih belum beranjak dari kemiskinan intelektual, moral, sosial, dan kemiskinan material, pada tahap inilah Rasulullah mengingatkan “Nyaris saja kemiskinan itu menyebabkan kekufuran” bahkan imam Ali menyebut kemiskinan sebagai kematian terbesar. Pada sisi lain islam adalah agama yang menjunjung tinggi etos, seperti dalam perincian berikut:³⁸

- a. Etos intelektual, seperti ditegaskan dalam Al-Quran : “Allah mengangkat orang yang beriman dan orang – orang yang diberi ilmu di antara kalian” (QS. Al-Fath:11).

³⁷ Aep Wahyudin. 2012. *Episteme Dakwatologi Komunikasi (Menakar Komunikasi islam dalam Epistemologi Triangular Relationship)*. Ilmu Dakwah: *Academic Journal for Homiletic Studies* Vol 6 No.2 Hlm 214

³⁸ Agus, Ahmad. Safei. *Sosiologi Islam Transformasi Sosial Berbasis Tauhid*. (Bandung : Simbiosis Rektama Media.2017) hlm 146

- b. Etos sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran: “Tahukah kamu siapakah yang mendustakan agama? Mereka adalah orang – orang yang menelantarkan anak – anak yatim dan orang – orang yang tidak berjuang mensejahterakan anak yatim” (QS. Al-Ma’un:1-3).
- c. Etos moral, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran: “Sungguh berbahagia mereka yang menyucikan dan mengingat nama Tuhanya” (QS. Al-A’la: 14-15).
- d. Etos belajar, “Apakah sama orang – orang yang berilmu dan orang – orang yang tidak berilmu (tidak belajar) ?” (QS. Az-Zumar:9).
- e. Etos kerja, “Bekerjalah. Segera Allah, Rasul-Nya dan seluruh umat yang beriman akan melihat hasil karyamu”(QS. At-Taubah:105).
- f. Etos transformasi dan metodologis, “transformasikanlah mereka kejalan Tuhanmu dengan penuh kearifan, super motivasi positif, dan sanggahlah mereka dengan cara – cara yang lebih metodologis” (QS. An Nahl:125).
- g. Etos Penghargaan (apresiasi) terhadap sebuah karya, “siapa yang berkarya baik, seberat zarah sekalipun, pastikan menyaksikan balasannya” (QS. Al- Zalzalah:7).

Melihat adanya perbedaan antara kenyataan yang menimpa masyarakat dan ideal ajaran islam oleh karena itu melahirkan model – model pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dengan berbagai macam metode dan inovasi, Pada dasarnya pembangunan nasional merupakan membangun manusia seutuhnya baik fisik maupun non fisik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Banyak ruang dan kesempatan yang dapat dilaksanakan oleh juru

dakwah dalam upaya peningkatan etos dan peningkatan taraf hidup manusia seutuhnya yakni dengan menjadi komunikator dalam penyampain pesan – pesan pembangunan, inovasi, dan motivasi dengan melalui tulisan dan bentuk perilaku kesilamanya mulai dari *irsyad* (internalisasi dan bimbingan nasional), *Tabligh* (transmisi dan penyebarluasan), *Tadbir* (Rekayasa sumber daya manusia) dan *Tahtwir* (pengembangan kehidupan masyarakat muslim) dalam aspek – aspek kultural universal.³⁹

Pada hakikatnya kegiatan dakwah diatas merupakan gambaran juru dakwah, dalam menyampaikan pesan dakwah sesuai dengan keilmuannya seperti konselor, jurnalis, mubaligh, manajer dan fasilitator pemberdayaan. Karena dalam implementasi dakwah dan pembangunan menekan pada proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan demikian setiap inovasi kegiatan dakwah maupun komunikasi pembangunan perlu adanya difusi sebagai upaya penyeragaman pemahaman kepada komunikan.

Dengan demikian dari landasan tersebut penelitian ini akan membahas bagaimana komunikasi yang dibangun pemerintah Kewilayahan Tamansari kepada masyarakat dan dapat membangun *feedback* atau respon bagi masyarakatnya, selanjutnya lebih dalam lagi dalam penelitian ini membahas bagaimana kegiatan komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Tamansari, sebagai penanggung jawab dalam terlaksananya Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang mana berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami

³⁹ Muhiddin, A. *Dakwah dalam Presfektif Al-Quran*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2002)

pentingnya pembangunan dan pemberdayaan guna meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian sebagaimana dengan landasan tersebut maka dapat digambarkan pada diagram sebagaimana berikut:

Gambar 2. Landasan Pemikiran

